

SKRIPSI

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANAH BARU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



OLEH :

**YUYUN SRIWAHYUNI
10775000076**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2012

ABSTRAK

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANAH BARU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh : Yuyun Sriwahyuni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan populasi dan sampel penelitian adalah aparatur desa dan masyarakat sebanyak 86 orang responden. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga peran Kepala Desa memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan questioner. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah. Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tanggapan responden tentang peran Kepala Desa termasuk pada kategori baik, sedangkan hasil tanggapan responden dalam variabel pembangunan termasuk dalam kategori baik. Hambatan yang dihadapi Kepala Desa dalam menjalankan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan dari hasil penelitian adalah minimnya sumber daya manusia, dan tidak adanya dana yang disebabkan dana desa yang terbatas.

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT atas segala Ridho dan Hidayahnya yang telah diberikan pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana program studi Jurusan Administrasi Negara pada fakultas ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Proposal ini berjudul **“Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara materiil maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Mahendra R selaku dekan di fakultas ekonomi dan ilmu sosial.
2. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Rusdi, S.Sos. MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
4. Bapak Riki Handri Malau, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi
5. Ibu Mustiqowati selaku dosen konsultasi proposal
6. Irdyanti, S.Ip MA selaku sekretaris ujian skripsi
7. Bapak Afrizal, S.sos, M.si selaku dosen penguji pertama (I).
8. Bapak Muslim, S.sos, M.si selaku dosen penguji dua (II).

9. Orang tua penulis yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan tiada mengenal kata lelah demi keberhasilan penulis.

10. Tidak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada bapak/ibu, dan seluruh rekan-rekan seperjuangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan disebabkan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari waktu, isi maupun dari penyusunan. Untuk itu dengan tangan terbuka penulis menerima segala saran dan kritikan dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.
Amin

Pekanbaru, Januari 2012

Penulis

Yuyun Sriwahyuni
10775000076

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK	
.....	i

KATA PENGANTAR.....	
.....	ii

DAFTAR ISI.....	
.....	iv

DAFTAR TABEL	
.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	
1	

1.2 Perumusan Masalah	
8	

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	
9	

1.4 Sistematika Penulisan	
9	

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan	
	11
2.2 Pengertian pembangunan	
	12
2.3 Pengertian desa, kepala desa dan fungsinya	
	17
2.4 Definisi kepemimpinan	
	32
2.5 Definisi konsep	
	38
2.6 Konsep operasional	
	39
2.7 Hipotesis	
	40
2.8 Variabel penelitian	
	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2 Jenis dan Sumber Data	41
3.3 Populasi dan Sampel	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	43
3.5 Teknik Analisa Data	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Monografi Desa	45
4.2 Keadaan Penduduk	46
4.3 Jenis Pencaharian	48
4.4 Agama	48
4.5 Kondisi Objektif Pemerintahan Desa	48
4.6 Letak Geografis	50
4.7 Sarana dan Prasarana Kerja	50
4.8 Infrastruktur Kantor Desa	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	52
5.2 Peran Kepala Desa	55
5.3 Pembangunan	75

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	87
6.2 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Biografi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Tentang respon masyarakat dalam menghadiri undangan rapat desa...	7
Tabel 3.1	: Populasi dan sampel.....	43
Tabel 4.1	: Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga	46
Tabel 4.2	: Jumlah penduduk desa Ranah Baru menurut mata pencaharian	47
Tabel 4.3	: Kondisi Aparatur Desa Ranah Baru.....	48
Tabel 4.4	: Kondisi Badan Permusyawaratan Desa Ranah Baru	49
Tabel 5.1	: Jumlah responden menurut kelompok umur.....	53
Tabel 5.2	: Jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.....	53
Tabel 5.3	: Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan	54
Tabel 5.4	: Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan	55
Tabel 5.5	: tanggapan responden tentang bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa ranah baru	57
Tabel 5.6	: Tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di desa ranah baru	58
Tabel 5.7	: Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa terhadap masyarakat.....	58
Abel 5.8	: Tanggapan responden tentang kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik	59
Tabel 5.9	: Tanggapan responden tntang pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mencapai visi.misi dan tujuan pemerintah desa.....	59

Tabel 5.10 : Rekapitulasi peran kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.....	60
Tabel 5.11 : Tanggapan responden tentang apakah kepala desa selalu membina kehidupan masyarakat desa	63
Tabel 5.12 : Tanggapan tentang pengawasan yang dilakukan kepala desa terhadap kinerja bawahannya dalam proses pembangunan fisik di desa ranah baru	63
Tabel 5.13 : Tanggapan responden tentang perekonomian desa ranah baru.....	64
Tabel 5.14 : Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong.....	64
Tabel V.15 : Rekapitulasi peran kepala desa dalam mebina kehidupan masyarakat desa	65
Tabel 5.16 : Tanggapan responden tentang apakah desa ranah baru sudah termasuk tentram	67
Tabel 5.17 : Tanggapan responden tentang ketertiban yang ada di desa Ranah Baru	
Tabel 5.18 : Tangapan responden tentang ketauladanan yang diberikan kepala desa terhadap masyarakat.....	67
Tabel 5.19 : Tanggapan responden tentang program yang dibuat kepala desa demi terciptanya ketentraman dan ketertiban	68
Tabel 5.20 : Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam menajga ketentraman dan ketertiban di desa Ranah Baru.....	68
Tabel 5.21 : Rekapitulasi peran kepala desa dalam memelihara	

	ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.....	69
Tabel 5.22	: Tanggapan responden tentang sudah atau belumnya kepala desa menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat dengan baik	69
Tabel 5.23	: Tanggapan responden tentang tanggapnya kepala desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat	71
Tabel 5.24	: Tanggapan responden tentang persengketaan yang sudah diselesaikan kepala desa dengan baik	72
Tabel 5.25	: Tanggapan responden tentang kebijakan ataupun keputusan yang dibuat kepala desa selama ini.....	72
Tabel 5.26	: Tanggapan responden tentang kepala desa bersikap adil dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat	73
Tabel 5.27	: Rekapitulasi peran kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa.....	74
Tabel 5.28	: Tanggapan responden tentang bagaimana kepala desa dalam mengembangkan kemampuan dan tenaga aparatur desa guna membuat perubahan	77
Tabel 5.29	: Tanggapan responden tentang bagaimanakah pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG (teknologi tepat guna) yang ada di desa Ranah Baru	78
Tabel 5.30	: Tanggapan responden tentang sarana prasarana yang ada dikantor kepala desa.....	78
Tabel 5.31	: Tanggapan responden tentang program yang dibuat kepala desa	

untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga kerja	
aparatur desa guna untuk membuat perubahan	
perekonomian desa kearah yang lebih baik.	79
Tabel 5.32 : Tanggapan responden tentang pembangunan KUD didesa	
Ranah Baru... ..	79
Tabel 5.33 :Rekapitulasi memberikan perhatian terhadap pengembangan	
kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan	80
Tabel 5.34 : Tanggapan responden mengenai apakah kepala desa sudah	
memberikan keadilan terhadap masyarakat dengan baik.....	82
Tabel 5.35 : Tanggapan responden mengenai apakah kepala desa sudah	
bersifat adil dalam memberikan jabatan kepada aparatur desa.....	83
Tabel 5.36 : Tanggapan responden mengenai pembangunan yang ada didesa	
Ranah Baru sudah merata dan adil dalam artian tidak pandang bulu	
antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya.....	83
Tabel 5.37 : Tanggapan responden tentang apakah kepala desa bersifat adil	
didalam setiap kegiatan-kegiatan rapat mengenai	
pengambilan keputusan-keputusan didalam rapat	84
Tabel 5.38 : Tanggapan responden tentang kepemimpinan kepala desa	
dalam membuat kebijakan untuk pembangunan desa. apakah sudah	
adil atau belum	84
Tabel 5.39 : Rekapitulasi keadilan (equity)	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka otonomi daerah, masalah pembangunan desa perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar dapat menjadi desa yang mandiri. Hal ini dikarenakan memiliki sumber daya alam yang perlu digali untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pelaksanaan pembangunan desa baru akan berhasil, jika pemerintah desa benar-benar dapat dilaksanakan tugas kepemimpinannya terutama dalam membuat perencanaan pembangunan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik, dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan.

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam kehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan

bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan mempunyai nilai strategis dan ciri-ciri khusus dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya terutama bagi kepentingan desa dan masyarakat pedesaan yang cukup besar jumlahnya. Penduduk desa sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia, merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia adalah ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengingat masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan di prioritaskan kepada pembangunan di pedesaan, sehingga dapat dikatakan keberhasilan pembangunan nasional akan tercermin dari keberhasilan pembangunan di pedesaan.

Agar pembangunan di pedesaan dapat terlaksana dan berjalan lancar diperlukan adanya satu pemerintahan yang mampu melaksanakan program pembangunan pada tingkat yang terendah yakni desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, menurut undang-undang tersebut pemerintahan desa merupakan pemerintahan tingkat terendah yang langsung bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintah, pembangunan maupun tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.

Pemerintah desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa, sebagai kekuatan terendah, pemerintah desa memiliki wewenang asli untuk

mengatur rumah tangganya sendiri (wewenang otonomi atau pemerintah sendiri) serta wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan serta bertahap dari pemerintahan diatas. Mengingat desa merupakan tempat segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang diatasnya maka seorang Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan desanya disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembanngan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral. Pembangunan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan pertumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat menjadi desa swasembada.

Dengan pembangunan desa diharapkan terciptanya landasan yang kokoh bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang diatas kekuatan sendiri, begitu pentingnya pembangunan desa dapat dipandang sebagai soko guru pembangunan nasional, karena tanpa pembangunan desa mustahil tujuan nasional akan tercapai. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemetaan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat cukup tinggi dan stabilitas wilayah tercipta dengan tentram, pembangunan desa harus didukung oleh seluruh masyarakat, sebab ia tidak saja membutuhkan dana, tenaga dan teknologi tetapi

juga membutuhkan kesadaran, pengertian dan dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi di desa, sebagai seorang penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa, oleh karena itu Kepala Desa harus mampu untuk mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan, perubahan-perubahan yang terjadi, sanggup membawa dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya kearah tujuan yang telah direncanakan.

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa. Kepala Desa merupakan pemimpin dari pemerintahan desa dengan masa jabatan enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

Kepala Desa menurut undang-undang otonomi daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Seorang Kepala Desa dalam memimpin masyarakat desa harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya terutama dalam pelaksanaan program pembangunan pedesaan.

Disini penulis mengambil tempat penelitian di desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa penulis mengambil tempat penelitian di desa Ranah Baru yaitu:

1. Desa ini merupakan pemekaran dari desa Ranah
2. Desa ini tidak memiliki lahan maupun tanah yang dapat diharapkan karena yang ada hanya lahan kosong.

Desa Ranah Baru merupakan desa pemekaran dari desa Ranah yang terbentuk pada tahun 2008 yang berada di Air Tiris. Desa Ranah Baru dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh para perangkat desa. Kepala desa dan perangkat desa berperan penting bagi kemajuan desa Ranah Baru.

Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dijalani Kepala Desa Ranah Baru yang bernama Anasril ini adalah: pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelatihan tentang pelaksanaan tata pemerintahan, pelaksanaan tentang pembahasan peraturan pemerintah/ PP NO 72 Tahun 2005, pelatihan tentang peningkatan tentang kinerja aparat desa, pelatihan tentang peningkatan perekonomian kerakyatan, pelatihan tentang penataan tata ruang kota pedesaan.

Adapun cara Kepala Desa dalam mempekerjakan pegawainya yaitu: memberdayakan sesuai dengan proporsi masing-masing, menumbuhkan kesadaran dan disiplin dalam kerja, meminta pertanggung jawaban atas perintah yang diberikan.

Output kepala desa setelah menjabat dari segi pembangunan yaitu: seminisasi (pembuatan jalan), dwiker, turap (tembok penahan tebing), dranase

(pembuatan parit), pembangunan jembatan dan tangga pemandian. Sedangkan yang sudah ada sebelum menjabat yaitu hanya drainase saja.

Adapun visi dan misi dibidang pembangunan desa yaitu: menembok sungai kampar, merehap atau memperbaiki rumah ibadah, membuka akses jalan baru, merehap lapangan bola, membuat jalan usaha tani, pembangunan Box Culvert dan pembangunan rumah sehat sederhana, tetapi sampai sekarang visi dan misi ini belum direalisasikan. .

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan pada desa Ranah Baru ditemukan beberapa gejala sehubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa ini yaitu :

1. Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan desa tidak melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wakil ketua BPD, yaitu bapak Drs. Munir beliau mengatakan bahwa BPD tidak berfungsi di desa Ranah Baru dikarenakan Kepala Desa tidak pernah mengikutsertakan dan melapor kepada BPD jika ingin membuat perencanaan pembangunan.
2. Kepala Desa belum bisa menyelesaikan persengketaan di dalam masyarakat. Kepala Desa selaku pemimpin di desa yang memiliki tugas untuk memberikan perdamaian dan kenyamanan ditingkat masyarakat desa agar tidak sampai ke jalur hukum, harus bisa untuk memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan pandangan agar mereka bisa berdamai ditingkat desa agar tidak sampai ke jalur hukum.

3. Tidak adanya pelatihan yang diberikan Kepala Desa terhadap masyarakat.
Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang diterima desa, sedangkan anggaran pelatihan desa itu dibebankan kepada anggaran desa.
4. Desa ini tidak memiliki lahan maupun tanah yang dapat diharapkan karena yang ada hanya lahan kosong.
5. Kurangnya partisipasi dan respon dari masyarakat dalam menghadiri undangan rapat desa.

Tabel 1 : Tentang Respon Masyarakat Dalam Menghadiri Undangan Rapat desa

No	Bulan	Kegiatan	Undangan	Hadir
1	10-Jun	Sosialisasi Ris PNPM desa	50	36
2	11-Jun	Sosialisasi peletakan pembangunan fisik	50	35
3	25-Jan-	Sosialisasi tingkat desa	50	39
4	04-Feb	Rembug Desa	50	39

Kepala desa dan LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) belum bisa memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

6. Gangguan stabilitas keamanan di Desa masih terjadi. Hal ini disebabkan pelaksanaan ronda malam tidak digiatkan atau belum dijalankan.

Maka penulis berpandangan bahwa kajian mengenai “peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, hal ini memang cukup urgen untuk dikemukakan.

Perlu dijelaskan bahwa beberapa gejala yang dijumpai dari hasil prasurvei tersebut, memberikan acuan sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan tugas yang dipikul oleh Kepala Desa dapat dijalankan. Dalam arti kemampuan seorang pemimpin masyarakat, dalam hal ini Kepala Desa menjalankan amanah dan tanggung jawab baik berupa wewenang dan tanggung jawab di bidang pemerintah. Pembangunan serta kemasyarakatan secara baik akan tergantung pada tingkat pendidikan yang dimilikinya. Apakah pendidikan formal, informal maupun nonformal. Dengan demikian tingkat pendidikan apabila dispesialisasikan merupakan ilmu yang sangat berharga bagi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu dapat di asumsikan bahwa beberapa gejala diatas merupakan pengujian dan evaluasi tentang sejauh mana pelaksanaan tugas yang dipikul oleh Kepala Desa tersebut. Dalam artian tidak selalu sama menjadi salah satu alternatif untuk ditelusuri sebagai faktor yang mempengaruhi atau penyebab timbulnya gejala di atas.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah di jelaskan diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan menetapkan judul penelitian sebagai berikut : **PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA RANAH BARU KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR.**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar Belakang masalah yang di uraikan terdahulu maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam**

pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

b. Manfaat penelitian

1. Bahan masukan bagi pihak Kepala Desa di Desa Ranah Baru dalam meningkatkan peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Bahan perbandingan bagi yang ingin melanjutkan penelitian pada masalah yang sama.
3. Sumbangan penulis bagi disiplin ilmu-ilmu sosial khususnya disiplin ilmu Administrasi Negara.

1.4 Sistematika Penulisan

dalam penulisan skripsi ini penulis akan menuangkan ke dalam 6 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dibahas pengertian dan jenis pendidikan serta pengertian desa, Kepala Desa dan fungsinya serta diakhiri dengan hipotesa dan variable penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini dibahas lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum desa lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, demografi dan stuktur organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dari berbagai pembahasan diatas, maka bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut Giros, Meson dan Mceahere mendefinisikan peranan adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Thoha (2003:10) peranan adalah merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu (dalam Hendri Saputra:2009).

Peranan menurut Berry peranan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Peranan individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan fungsi sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain/ dalam hidup antara atasan dan bawahan.*
- b. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan peranannya sebagai orang pemberi harapan pada orang lain (dalam Hendri Saputra:2009).*

Peranan Pemerintah Desa adalah diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut atau anggota ataupun orang yang berbeda didalamnya atau sekelilingnya.([http: dspace:widyatama.ac.id/bitstream/handle/04-022011](http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/04-022011)) .

Pemerintah Desa merupakan orang-orang dimana tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapan. Makanya Pemerintah sangat berperan dalam mewujudkan harapan-harapan itu. Harapan-harapan itu berupa: kemakmuran,

kesejahteraan, dan kemajuan. Dalam mewujudkan pembangunan fisik maupun non fisik.

1.2 Pengertian Pembangunan

Sebagai landasan berfikir dalam mengkaji masalah pembangunan dan pelaksanaan tugas Kepala Desa ini, penulis menggunakan beberapa tulisan yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian “peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Dimaksudkan agar tulisan ini lebih terarah, logis dan konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam buku Talizi Duhu Ndraha yang berjudul Kybernologi istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun”. Sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti: pertama sadar, kedua bangkit, ketiga bentuk, keempat membuat/mendirikan, kelima mengisi/ membina. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep pembangunan tersebut. Konsep itu antara lain adalah pengembangan (*Development*), pertumbuhan (*growl*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social*), pembebasan (*Liberation*), perubahan (*Innovation*), reformasi (*Reformation*) dan penemuan kembali (*Reinventions*).

Menurut Don Murdono dan Tumpal P. Saragi (dalam Hikmat, 2004:51) pembangunan ialah suatu proses perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, hal ini harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner melalui berbagai disiplin ilmu yang berorientasikan kepada *People Centered Development* (memanusiakan manusia) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, demokratis dan

mengutamakan gender, untuk itu diperlukan perencanaan yang baik agar bejalan secara optimal.

Menurut Tjokroamidjodjo dan Mstopadidjaya (dalam Sufian,2003:58) memberikan pengertian bahwa pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional menuju kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional.

Menurut Nugroho (2003:67) pembangunan adalah suatu kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang, melibatkan seluruh warga negara dan dunia internasional dengan menyerap hampir seluruh sumber daya negara dan bangsa.

Menurut Sumodiningrat (dalam Nugroho dan Dahuri,2004:9) pembangunan itu adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang lebih manusiawi.

Menurut Sondang P.Siagian (2001:4) administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Roger (dalam Nasution Zulkarimen 2002:82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu.

Menurut Hamin (2003) pembangunan adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.

Sesuai pula dengan pengertian yang diberikan oleh Nurman (dalam siasat jurnal ilmu politik vol 12,2003) menurutnya pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berkelanjutan dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa derasnya laju pembangunan di Desa adalah kelincahan daya inisiatif dan keterampilan pemerintah desa dan dilaksanakan dalam rangka keseimbangan kewajiban yang sewajarnya antara lain pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan sebagai upaya suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi:

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap "kapasitas" terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Ia mencakup keadilan (equity). Perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kepastiannya.
3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

a. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes)

Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah (RKP).

Peraturan Desa No : 02 Tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDDes) yaitu:

1. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam menyusun RKPDDesa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
2. RKPDDesa berdasarkan RPJMDDes 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Desa.
3. Berita acara RKPDDesa ditandatangani oleh pemerintah desa dan LPM/LKMD atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKPDDesa.

4. RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk atau wajib di usulkan ke RKP Daerah.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Maksud disusunnya RPJMDes adalah sebagai pedoman bagi setiap perangkat desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Tujuan disusunnya RPJMDes adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa.

b. Pelaksanaan Kerja

- i. bidang pemberdayaan keluarga dan keswadayaan masyarakat.

Program :

1. peningkatan keberdayaan masyarakat
2. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Peningkatan peran perempuan dipedesaan.
4. Peningkatan partisipasi wanita dalam perencanaan dan pembangunan desa/ kelurahan.

- ii. Bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Program :

1. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.

2. Peningkatan keberdayaan masyarakat.

iii. Bidang pemberdayaan kawasan pedesaan.

Program :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

2. Pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG (teknologi tepat guna).

iv. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan.

Program :

1. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa/ kelurahan

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3. Penyempurnaan dan pengembangan data statistik.

v. Sekretariat

Program : peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.3 Pengertian Desa, Kepala Desa dan Fungsinya.

a. Pengertian Desa

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang tidak berhak menyelenggarakan

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja,2003:3).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintahan Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional (Widjaja, 2005:92).

Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih penduduk setempat sedangkan kelurahan dikepalai oleh seorang lurah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dari pegawai negeri yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, maka memiliki badan perwakilan desa (BPD) sedangkan kelurahan tidak mempunyai BPD.

b. Pengertian Kepala Desa dan Fungsinya

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan aparat pemerintah yang paling dekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat dan membutuhkan ketekunan yang tinggi, disamping dituntut peranan yang aktif untuk mengupayakan dan menciptakan strategi dan metode dalam menghadapi tuntutan tugas.

Kepala Desa sebagaimana yang di jelaskan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 dalam pasal 202 Ayat 1 adalah Kepala Desa dipilih

langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya di atur dengan PERDA yang berpedomen kepada peraturan pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kelancaran pemerintah yang berdaya guna sesuai dengan perkembangan pemerintah, maka sebagai pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang di dalamnya mencakup Pemerintah Desa, maka ditetapkanlah susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa serta perangkat desa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 214.

Kepala Desa sebagai pemimpin terdepan dan aparat pemerintah dan langsung berhubungan dengan masyarakat mengemban tugas dan tanggung jawab yang berat.

Kepala Desa sebagai tulang punggung suatu desa harus memiliki kepribadian dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang bisa mengarahkan dan mengayomi masyarakat yang di pimpinnya. Ada tiga tugas pokok pemimpin yang dinamakan tri fungsi kepemimpinan Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 yaitu :

1. Tugas menanggapi situasi masyarakat.
2. Tugas menilai masyarakat.
3. Menentukan sikap atau tindakan terhadap situasi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal pengambilan keputusan.

Ketiga tugas kepemimpinan tersebut diarahkan kepada pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pembangunan desa yaitu :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Memberikan pelayanan yang ekstra kepada masyarakat.
3. Mengarahkan partisipasi masyarakat.
4. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Karena adanya keanekaragaman tugas yang dibebankan kepada Kepala Desa sebagai seorang pemimpin di desanya maka untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan kemampuan untuk memimpin.

Ada tiga dimensi untuk mengukur efektifitas kepemimpinan yaitu :

1. Hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau juga kepercayaan yang diberikan bawahan kepada atasannya.
2. Tingkatan tugas-tugas bawahan, apakah berupa struktur tugas atau sekedar rutinitas.
3. Kekuasaan yang melekat pada fungsi kepemimpinan tersebut (Terry dalam Winardi, 2002:155).

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari beberapa faktor:

1. Motivasi pemerintah formal yaitu bantuan pemerintah baik moril maupun materil.
2. Motivasi pemimpin informal yakni dorongan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di Desanya.
3. Motivasi masyarakat yaitu keinginan masyarakat itu sendiri dalam membangun desanya.

Tugas dan fungsi desa berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang di serahkan pengaturannya Kepala Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.
5. Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
5. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kekuasaan hukumnya.

Di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa:

1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Rakyat.
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Menurut PP No: 72 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi pengelola desa adalah:

a. Kepala Desa

1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 45 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
4. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN.
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
7. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
8. Menyelenggarakan administrasi desa yang baik.
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa yang dapat dibantu oleh lembaga adat desa.
12. Mengembangkan pendapat masyarakat dan desa.
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/walikota, memberikan laporan keterangan kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
17. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat satu (1) kali dalam satu tahun.
18. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu (1) kali dalam satu (1) tahun dalam masyarakat BPD.
19. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa atau radio komunitas.
20. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD.

b. Sekretaris Desa

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.

4. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatat mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c. Kepala Urusan Keuangan

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi, pajak yang dikelola oleh desa.
4. Melakukan kegiatan administrasi keuangan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Kepala Urusan Pembangunan

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek atau daftar isian kegiatan.

e. Kepala Urusan Pemerintah

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah.
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa.
5. Melaksanakan kegiatan masyarakat antara lain: RT, RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil. (ctt: sekarang menjadi pelindung masyarakat/ linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa.
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Melaksanakan, mengawasi serta membina Ex-Tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

f. Kepala Urusan Umum

1. Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat. Desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat inventarisasi kekayaan desa.
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Peraturan daerah Kabupaten Kampar No. 12 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pemerintahan desa adalah:

1. Bidang Pertanian

- a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan
- b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani
- c. Pemasyarakatan panca usaha tani

- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat kabupaten dan kota
 - e. Pengembangan lumbung desa
 - f. Penetapan pola waktu musim tanam
2. Bidang Pertambangan dan Energy
- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat
 - b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetic
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu
 - b. Pengolahan dan pelestarian hutan desa
 - c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan kebun bibit desa
 - d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan
 - f. Pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul
4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. Rekomendasi izin usaha industry
 - b. Rekomendasi investasi di desa
 - c. Rekomendasi izin gangguan
 - d. Rekomendasi izin usaha perdagangan
 - e. Pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan

5. Bidang Perkoperasian

- a. Rekomendasi dan pengawasan pemberian kredit di desa
- b. Pengelolaan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dan dana investasi

6. Bidang Tenaga Kerja

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenaga kerjaan
- b. Pendataan dan pengklasipikasian tenaga kerja/ penduduk usia kerja

7. Bidang Kesehatan

- a. Pembinaan kesehatan masyarakat
- b. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif
- c. Pelaksanaan pos pelayanan terpadu
- d. Pengelolaan Dana Sehat

8. Bidang pendidikan dan kebudayaan

- a. Rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA, SD/MI, SLTP/MTS, SLTA/MA
- b. Pemeliharaan fasilitas pendidikan yang ada di desa
- c. Penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan
- d. Pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya dan adat istiadat yang ada di desa
- f. Pembinaan kegiatan pemuda dan olahraga
- g. Pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM)

- h. Penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah

9. Bidang Sosial

- a. Pembinaan penyandang masalah sosial
- b. Pengurusan orang miskin dan terlantar
- c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada pemerintah daerah
- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial
- e. Pembinaan karang taruna
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat

10. Bidang PU

- a. Sosialisasi dan izin mendirikan bangunan
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah di konstruksikan

11. Bidang Perhubungan

- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa
- c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa

12. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pembinaan lingkungan hidup
- b. Pengawasan pembuangan limbah
- c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air di desa
- d. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup di desa

13. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negri

- a. Pembinaan ideologi bangsa dan pemeliharaan data / dokumen politik
- b. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- c. Penyelenggaraan pemilihan umum
- d. Penanggulangan bencana alam
- e. Pengelolaan dana bantuan bencana alam

14. Bidang Otonomi Desa

- a. Penetapan organisasi pemerintahan desa
- b. Penetapan perangkat desa
- c. Penetapan pembentukan lembaga kemasyarakatan
- d. Penetapan pembentukan BPD
- e. Penetapan APB Desa
- f. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat
- g. Penetapan peraturan desa
- h. Kerjasama antar desa
- i. Pembentukan badan usaha milik desa (BUM Desa)
- j. Penetapan retribusi pasar desa
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat

15. Bidang Perimbangan Keuangan

Pengelolaan keuangan bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi tertentu dari kabupaten.

16. Bidang Tugas Pembantuan

Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, provinsi dan kabupaten.

17. Bidang Pariwisata

- a. Pengelolaan objek wisata lainnya di desa diluar rencana induk pariwisata.
- b. Pembinaan masyarakat sadar wisata.

18. Bidang Pertanahan

- a. Pelayanan administrasi pertanahan.
- b. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.

19. Bidang Kependudukan

- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan
- b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usaha ekonomi produktif.
- c. Registrasi kependudukan.

20. Bidang Perencanaan

- a. Penyusunan profil desa
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa.
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa.

21. Bidang Penerangan, Informasi dan Komunikasi

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial.
- b. Pengawasan peredaran/ pemutaran film keliling.
- c. Pemantauan peredaran VCD /film.
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan.
- e. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan/ balai desa.
- f. Pemantauan media informasi/ cetak yang beredar.

2.4 Definisi Kepemimpinan

Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada kemampuan untuk mempengaruhi. Dengan kata lain kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi yang baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu (Anoraga, 2003:2).

Kepemimpinan menurut Ordway Tead dalam Kartono, (2002:49) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Disini dapat ditangkap suatu pengertian bahwa jika seseorang telah mulai berkeinginan untuk mempengaruhi orang lain, maka kepemimpinan itu telah dimulai (Thoha, 2003:121).

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar mereka suka berusaha dan untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok (Winardi, 2000:56).

Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan kelompok (Terry, 2002:180).

Kepemimpinan dalam arti luas menurut Sufian (2005:221) adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.

Pemimpin adalah teladan yang bagi para bawahan yang ada di sebuah perusahaan. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk bisa mempengaruhi, pintar, memiliki pengalaman yang luas dan lain sebagainya. Tetapi juga harus mampu memainkan peran-peran penting dalam suatu kondisi di organisasi atau perusahaan. (Handoko, 2003:297)

Pemimpin ditinjau dan pendekatan studi menurut Zulkifli (2005:190) adalah sebagai seorang personil yang karena keunggulan, prestasi dan tingkat pengabdian yang melalui sistem proses tertentu dipercayakan dan diangkat oleh pejabat berwenang pada suatu jawaban struktural dalam suatu struktur organisasi tertentu.

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu.

Pemimpin memiliki sifat kepribadian seperti vitalis dan stamina fisik, kecerdasan dan kearifan dalam bertindak, kemauan menerima tanggung jawab, kompeten dalam menjalankan tugas, memahami kebutuhan pengikutnya, memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk berprestasi, mampu memotivasi dan memberi semangat, mampu memecahkan masalah, meyakinkan, memiliki kapasitas untuk mengelola-memutuskan-menentukan prioritas, mampu memegang kepercayaan, memiliki pengaruh, mampu beradaptasi atau memiliki fleksibilitas. (Rivai, 2003: 30)

a. Karakteristik pemimpin yang berhasil

Karakteristik pemimpin yang berhasil memiliki sifat dan keterampilan tertentu. Cirinya antara lain dapat beradaptasi dengan situasi, peka terhadap lingkungan sosial, ambisius serta berorientasi pada hasil, tegas, dapat bekerja sama, meyakinkan, mandiri, mampu mempengaruhi orang lain, enerjik, tekun, percaya diri, tahan stress, dan memikul tanggung jawab. Sedangkan keterampilan yang harus dimiliki pemimpin antara lain : cerdas, trampil secara konseptual, kreatif, diplomatis, dan taktis, lancar berbahasa, memiliki pengetahuan terhadap tugas kelompok, mampu mengorganisasi, mampu mempengaruhi dan meyakinkan, dan memiliki keterampilan sosial. (Rivai, 2003:30)

b. Fungsi kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/ organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial suatu kelompok/ organisasi. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi seperti :

1. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan (*direction*) dalam tindakan atau aktivitas pemimpin.
2. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (*support*) atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok/organisasi.

Secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

a) Fungsi instruksi.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

b) Fungsi konsultasi

Konsultasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feed back) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

c) Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya.

d) Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/ menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan.

e) Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/ efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

c. Tipe kepemimpinan

Perilaku kepemimpinan yang berwujud pada kategori kepemimpinan yang terdiri dari tiga tipe pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan.

2. Tipe Kepemimpinan Kendali Bebas

Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Pemimpin hanya memfungsikan dirinya sebagai penasihat.

3. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Tipe kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam setiap kelompok / organisasi. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah.

d. Tanggung Jawab Seorang Pemimpin

Tanggung jawab seorang pemimpin menurut Robert C Maljus adalah:

1. Menentukan tujuan dan pelaksanaan kerja yang realistis dalam arti kuantitas, keamanan, dan lain sebagainya.
2. Melengkapi para karyawan dengan sumber dana yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

3. Mengkomunikasikan kepada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka.
4. Memberikan susunan hadiah yang sepadan untuk mendorong prestasi.
5. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dari mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
6. Menghilangkan hambatan untuk melaksanakan pekerjaan yang efektif.
7. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
8. Menunjukkan perhatian kepada para karyawan. (Anoraga, 2003: 03)

e. Tugas pemimpin

Solusi yang harus dilakukan untuk pemberdayaan terhadap kepemimpinan bangsa dengan melaksanakan tugas manajerial atau *manajer task* dan tugas komunikasi atau *communication task*.

1. Menurut Massardi dalam Rustam (2010) ANM Yudistira dalam pemimpin modern meliputi pemimpin memelihara, mengelola, mengembangkan dan melegitimasi sumberdaya budaya. Untuk itu, salah satu tugas kepemimpinan terkait dengan dimensi manajerial, dimana merujuk kepada pendapat Jhon Maxwell yang mengatakan bahwa pemimpin mampu menemukan dan memberi tempat yang tepat bagi masyarakat atau orang banyak.
2. Tugas komunikasi meliputi pola komunikasi pemimpin yang harus bergerak dari prinsip populis menuju asertif. Populis itu berorientasi ingin menyenangkan dan merangkul sebanyak mungkin orang. Karena itu para

pemimpin cenderung bersikap sopan santun dan hati-hati. Sehingga substansi atau tujuannya tidak sampai. Sedangkan, asertif cenderung bersikap tegas dalam hal bersikap dan substansi pesan sampai kepada penerima pesan.

Tugas terpenting bagi pemimpin yang sukses adalah membantu, membina, serta menemukan bakat-bakat dan potensi, menjaganya, dan mengarahkannya untuk kepentingan individu kemudian dan kepentingan perusahaan.

f. Empat sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi

1. Kecerdasan; pada umumnya pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin.
2. Kedewasaan; pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial.
3. Motivasi diri dan dorongan berprestasi; pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi.
4. Sikap hubungan kemanusiaan; pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahan. (Riva'I, 2003:117)

2.5 Definisi Konsep

Adapun definisi yang di ajukan dengan penelitian ini adalah :

- a. Desa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu wilayah yang ditempati oleh penduduk yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

- b. Kepala Desa adalah warga Negara Indonesia asli yang di pilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk didesanya yang di angkat oleh Bupati atau Walikota diantaranya atas nama Gubernur.
- c. Pembangunan adalah sebagai suatu kegiatan atu usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi ke kondisi yng lebih baik.
- d. Tugas Kepala Desa adalah menunjukkan kepada masyarakat tindakan melakukan yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.6 Konsep Operasional

Guna menghindari perbedaan persepsi serta perbedaan interpretasi atas indikator yang ada dalam penelitian ini, maka disini penulis menguraikan terlebih dahulu beberapa konsep yang terkandung didalam penelitian atau yang menjadi konsep operasionalnya.

- a. Peranan adalah merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu.
- b. Kepala Desa adalah pemimpin eksekutif (badan pelaksana undang-undang) di lembaga pemerintahan desa.
- c. Pembangunan adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.

- d. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam bingkai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang tidak berhak menyelenggarakan

2.7 Hipotesis

Diduga peran Kepala Desa memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

2.8 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian dengan indikator sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

2. Pembangunan dengan Indikator sebagai berikut:

- a. Memberikan perhatian terhadap pengembangan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
- b. keadilan (equity). Perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kepastiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan selesai.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dimana data ini meliputi tanggapan responden terhadap kinerja Kepala Desa, dengan cara wawancara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data berupa laporan-laporan dan catatan-catatan pada objek penelitian yang berasal dari Kantor Kepala Desa dan pegawai-pegawai terkait yang disesuaikan dengan keperluan penelitian.

1.3 Populasi dan Sampel

Populasi berasal dari bahasa Inggris *population*, yang berarti jumlah penduduk. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan,, tumbuh-

tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.(Bungin, 2006:99)

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono 2007:90)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai atau perangkat desa yang ada di Kantor Kepala Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang berjumlah 9 orang dan masyarakat yang berjumlah 344 KK

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan.

Berdasarkan rumus diatas, dengan menggunakan tingkat eror 10% maka ukuran sampelnya adalah

$$\begin{aligned} N &= \frac{344}{1+344(10\%)} \\ N &= \frac{344}{1+344(0,01)} \\ N &= \frac{344}{1+3,44} \\ N &= \frac{344}{4,44} \\ N &= 77,4 = 77 \end{aligned}$$

Untuk jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 populasi dan sampel

NO	SUB POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASE
1	Perangkat desa	9	9	100
2	Masyarakat	77	77	100
	Jumlah	86	86	100

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan bentuk penelitian kualitatif.. Populasi kajian ini adalah semua pegawai atau perangkat desa yang terdiri dari 9 orang dan masyarakat yang berjumlah 77 orang. Populasi ini sekaligus menjadi sampel dalam penelitian ini karena menurut Suhaimi Arikunto jika populasi berjumlah dibawah 100 orang maka semua harus dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara yaitu cara peneliti mendapatkan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan responden sambil mengamati dan mempelajari kejiwaannya.
2. Quisioner yaitu cara peneliti jalankan dengan inisiatif sendiri, dengan pembuatan daftar pertanyaan yang disebarakan untuk di isi dengan responden guna mendapatkan data yang diperlukan.

1.5 Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi ini digunakan data kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah.

Penelitian ini berbentuk kualitatif yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul, setelah data yang diperoleh dari responden penelitian dan berdasarkan data primer dan sekunder, maka dikelompokkan sesuai jenis data dan dalam bentuk tabel dengan uraian dan penjelasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Monografi Desa

Desa Ranah Baru adalah salah satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Desa ini memiliki luas ± 1.856 Ha, 15,33% wilayahnya merupakan areal pemukiman, 42,6% areal pertanian dan 22,28% perkebunan sedangkan 19,89% merupakan lahan tidur/ hutan belukar, rentang kendali pemerintahan desa Ranah Baru memiliki jarak dengan KANTOR Camat Kampar ± 1 KM dan jarak dengan kantor bupati kampar ± 10 KM dapat ditempuh dengan kendaraan roda empat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Ranah Baru ini adalah :

Sebelah utara dengan Desa Ranah

Sebelah barat dengan Kelurahan Air Tiris

Sebelah selatan dengan Desa penyasawan

sebelah timur dengan Desa Ranah

penduduk Desa Ranah Baru mayoritas adalah suku melayu dan pendatang adalah suku jawa. Walaupun demikian terjalin hubungan yang harmonis antar warga, karena selama ini tidak pernah ada terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan suku bahkan terlihat antar warga nampak saling hormat menghormati adat-istiadat masing-masing suku. Hal ini mungkin terjadi karena mata pencaharian penduduk desa ini mayoritas adalah petani, sehingga mereka ikut

tergabung dalam kelompok tani desa Ranah Baru yang tentunya akan menambah terjalinnya hubungan silahturrahmi antar warga.

1.2 Keadaan Penduduk

Faktor penduduk merupakan salah satu dasar penentuan dalam menentukan dinamika pembangunan. Struktur penduduk yang kurang merata akan mengarah dalam usaha peningkatan penggerakan swadaya gotong royong masyarakat guna meningkatkan pembangunan di desa. menurut monografi desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, jumlah penduduk pada akhir tahun 2011 adalah sebanyak 927 orang laki-laki, perempuan 939 orang dengan jumlah kepala keluarga 344 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga

Jumlah Kepala Keluarga (KK)	344
Jumlah Penduduk	1.866
Jumlah Laki-laki	927
Jumlah Perempuan	939

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Ranah Baru

1.3 Jenis Mata pencaharian

Mata pencaharian utama penduduk desa Ranah Baru adalah bertani. Menanam padi adalah merupakan pertanian masyarakat semenjak awal desa ini beridiri, sehingga mayoritas penduduk desa Ranah Baru adalah menanam padi,

disamping itu ada juga penduduk yang berkebun sayur-sayuran tetapi jumlahnya jauh lebih kecil. Lahan pertanian adalah seluas 855 hektar sedangkan luas perkebunan adalah 131 hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian masyarakat dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Jumlah penduduk desa Ranah Baru menurut mata pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Pegawai negri	165	8,6%
2	Abri/polri	5	0,3%
3	Karyawan swasta	67	3,5%
4	Wiraswasta	43	2,2%
5	Pedagang	81	4,2%
6	Buruh	81	4,2%
7	petani	5909	47,2%
8	Lain-lain	575	29,8%
9	jumlah	1926	100%

Sumber Data: kantor kepala desa Ranah Bru 2011

Dari tabel IV.II terlihat bahwa penduduk desa Ranah Baru mayoritas bekerja sebagai petani yaitu berjumlah 575 orang atau 29,8%. Kemudian jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah abri/polri.

1.4 Agama

Penduduk desa Ranah Baru pada umumnya mayoritas menganut agama islam dan tidak ada yang beragama non muslim karena penduduk di desa ini 100% beragama muslim.

1.5 Kondisi Objektif Pemerintahan Desa

Wilayah pemerintahan desa Ranah Baru terbagi atas IV dusun . unsur pemerintahan desa Ranah Baru sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD.

Saat ini Desa Ranah Bru dipimpin oleh kepala desa bernama Anasril yang mana beliau baru menjabat satu tahun jalan 2 tahun yang lalu. Dalam menjalankan tugasnya kepala desa dibantu pula oleh Aparatur desa yang terdiri dari unsur sekdes dan kepala seksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Kondisi aparatur desa Ranah Baru

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	ANASRIL	Kepala desa	SMA
2	SUHARNI	Sekretaris desa	SMA
3	MUAMMAR	Kaur pemerintahan	SMA
4	ZUFRLS	Kaur pembangunan	SMA
5	RATIH RIZZIANI	Kaur keuangan	SMA
6	M. RAFFI	Kaur umu	SMA
7	MHD. NUR.R	Kadus I	SMA
8	DARUSSMAN	Kadu II	SMA
9	RONI CANDRA	Kadus III	SMA
10	AMSAR	Kadus IV	SMP

Sumber data: kantor kepala desa ranah baru 2011

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa aparat desa sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik yaitu SMA , sehingga dengan demikian diharapkan aparatur desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai pelayan masyarakat.

Selanjutnya badan permusyawaratan desa sebagai salah satu pemerintahan desa merupakan mitra kerja kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BPD merupakan lembaga legislatif desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa, berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Untuk melihat kondisi BPD desa Ranah Bru dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Kondisi badan permusyawaratan desa Ranah Baru

NO	NAMA	JABATAN
1	SYAMSUARDI,S.sos	KETUA
2	Drs, MUNIR	WAKIL KETUA
3	Drs, AHMAD FIRDAUS, Msc	SEKRETARIS
4	H.MUHAMMAD NASIR.YS	ANGGOTA
5	ZARUDIN	ANGGOTA
6	FAHRAINI	ANGGOTA
7	AFRIZAL	ANGGOTA

Sumber data: kantor kepala desa Ranah Baru,2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa badan permusyawaratan desa memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu sampai keperguruan tinggi, untuk itu diharapkan badan permusyawaratan desa bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

1.6 Letak geografis

Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar terletak diantara 101° 06'05" s/d 100° 07'00" Bujur Timur dan 00° 19'40" s/d 00° 21'45" Lintang Utara. Desa Ranah Baru terletak didataran sedang, topografi lahan sebagian besar datar dan berawa-rawa kering, berada pada ketinggian \pm 5-10 meter diatas permukaan laut

1.7 Sarana dan prasarana kerja

Sarana kerja dan perlengkapan Kantor Desa ranah Baru memiliki 1 unit mesin tik, 1 unit komputer, 1 unit sound system untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Maubiler yang terdapat pada Kantor Desa Ranah Baru terdiri dari 1 set meja tamu, meja kerja Kepala Desa, meja kerja Sekretaris Desa, 4 set meja kerja Kaur dan 2 buah lemari arsip dan 1 lemari pajang dan filing kabinet.

Pengadaan moubiler dan peralatan kerja oleh Kepala Desa Ranah Baru diadakan secara swadaya dan bantuan dari berbagai pihak kondisi peralatan baru.

1.8 Infrastruktur Kantor Desa

Kantor Desa Ranah Baru terletak didusun Kampung Baru, dipinggir jalan Kabupaten. Kantor Kepala Desa rumah masyarakat di dusun Kampung Baru. Kantor Kepala Desa terdiri dari ruang kerja kepala desa, ruang tamu, ruang kerja perangkat desa. Ruang kerja kepala desa telah tertata dengan baik dimana terpasang gambar Bupati dan Wakil Bupati Kampar sedangkan di ruang kerja perangkat desa telah terpasang dan tertata baik gambar Presiden dan Wakil

Presiden Indonesia, lambang negara Burung Garuda, baga struktur organisasi pemerintahan desa, BPD, LKMD dan dilengkapi dengan sarana kerjanya.

Ruang pertemuan masyarakat memanfaatkan masjid di Dusun Kampung Baru, namun jika pertemuan tidak terlalu banyak pesertanya dapat dilaksanakan di ruang tamu Kantor Kepala Desa Ranah Baru. Lapangan upacara bagi perangkat desa dilaksanakan di halaman kantor desa, sedangkan untuk upacara yang melibatkan masyarakat banyak dilaksanakan di lapangan olahraga pemuda Kampung Baru.

Papan informasi desa telah terpasang di ruang tamu kantor Desa Ranah Baru, aktifitas lainnya seperti pembagian beras miskin juga dilaksanakan di ruang tamu kantor Kepala Desa Ranah Baru.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pihak perangkat desa dan masyarakat yang terpilih sebagai responden dalam penelitian ini untuk memberikan tanggapannya tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Quesioner yang disebarakan sebanyak 28 eksemplar sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian telah dikumpulkan sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden dan peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.1 Identitas Responden

Data tentang identitas responden menyangkut tentang kelompok umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang disebarakan kepada 28 responden.

1. Kelompok Umur Responden Masyarakat

Dalam penelitian tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu: koordinasi komunikasi, keadaan usia penduduk sangat perlu diperhatikan, karena usia penduduk tersebut dapat menjadi pedoman untuk mengetahui seperti apa peran yang diharapkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. untuk mengetahui kelompok umur berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5.1. Jumlah responden menurut kelompok umur

NO	KELOMPOK UMUR	RESPONDEN	PERSENTASE
1	23-35	40	46,5 %
2	36-45	30	34,8 %
3	46-55	10	11,6 %
4	56-70	6	6,9 %
	JUMLAH	86	100 %

Sumber data: Kantor Desa Ranah Baru 2011

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat diketahui kelompok umur 23-35 tahun sebanyak 40 responden (46,5%). Kelompok umur 36-45 tahun sebanyak 30 responden (34,8%). Kelompok umur 46-55 tahun sebanyak 10 responden (11,6%). Kelompok umur 56-70 tahun sebanyak 6 responden (6,9%). Sehingga berdasarkan tabel 8 diatas dapat diketahui kelompok umur yang terbanyak adalah 23-35 tahun.

2. Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh dilapangan identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	RESPONDEN	PRESENTASI
1	PRIA	43	50%
2	WANITA	43	50%
	JUMLAH	86	100%

Sumber Data: Kantor Desa Ranah Baru 2011

Berdasarkan tabel 5.2 diatas maka dapat diketahui bahwa yang menjadi responden pada penelitian sebagian besar atau secara umum adalah berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 43 orang (50%) sedangkan selebihnya berjenis kelamin wanita sebanyak 43 orang (50%).

3. Tingkat pendidikan formal responden masyarakat

Pendidikan merupakan hal yang penting karena dapat menciptakan keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tinggi rendahnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi sikap dan pola Fikir seseorang terutama ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3. Jumlah Responden Berdasarkan tingkat pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1	Sekolah dasar (SD)	6	7 %
2	Sekolah menengah pertama (SMP)	8	9,3 %
3	Sekolah menengah atas (SMA)	60	69,7 %
4	Sarjana	12	13,9 %
	JUMLAH	86	100 %

Sumber: Kantor Desa Ranah Baru 2011

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi responden pada penelitian ini adalah tingkat pendidikan responden yaitu SD berjumlah 6 orang (7%), SMP berjumlah 8 orang (9,3%), SMA berjumlah 60 orang (69,7%) dan sarjana berjumlah 12 orang (14%).

4. Jenis pekerjaan responden masyarakat

Pekerjaan sumber hidup seseorang dengan mata pencarian inilah manusia membiayai kehidupan dunia, dimana juga pekerjaan ikut mengangkat derajat manusia. Adapun pekerjaan responden yang membutuhkan pelayanan administrasi dari Kantor Desa Ranah Baru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.5.4. Jumlah responden berdasarkan jenis pekerjaan

NO	JENIS PEKERJAAN	RESPONDEN	PERSENTASE
1	PNS	25	29,1 %
2	Tenaga honorer	10	11,6 %
3	Wiraswasta	35	40,7 %
4	Ibu rumah tangga	10	11,6%
5	Penjahit	1	1,2 %
6	Petani	4	4,6 %
7	Supir	1	1,2 %
	JUMLAH	86	100%

Sumber: Kantor Desa Ranah Baru 2011

Dari tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa responden masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan yang terbanyak adalah responden yang mempunyai pekerjaan PNS sebanyak 25 orang (29,1%) dan wiraswasta sebanyak 35 orang (40,7%). Sedangkan yang paling sedikit adalah yang mempunyai pekerjaan penjahit sebanyak 1 orang (1,2%), petani sebanyak 4 orang (4,6%) dan supir sebanyak 1 orang (1,2%)

1.2 Peran Kepala Desa

Peranan pemerintah desa adalah diartikan sebagai suatu yang berkenaan dengan serangkaian tugas atau sebagian yang harus dilaksanakan guna memenuhi harapan dari para pengikut atau anggota ataupun orang yang berbeda didalamnya atau sekelilingnya.

Pemerintah desa merupakan orang-orang dimana tempat masyarakat menggantungkan harapan-harapan. Makanya pemerintah sangat berperan dalam

mewujudkan harapan-harapan itu. Harapan-harapan itu berupa: kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan.

Bagi seorang pemimpin baik formal maupun informal dalam menjalankan peranannya akan melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Demikian pula dengan hal-nya Kepala Desa sebagai kepala pemerintah ditingkat desa. ia merupakan pejabat desa yang mempunyai tanggung jawab moral dan politik bahwa ia adalah seorang pemimpin yang patut diikuti dengan segala kemampuan dan prestasi yang dimilikinya selama ia bertugas akan memberikan asuransi bahwa dalam operasionalnya nanti Kepala Desa dapat melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya.

Pembangunan merupakan suatu proses pembaruan yang kontinyu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan itu meliputi segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang kesemuanya itu akan berhasil apabila melibatkan partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat itu meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pemeliharaan.

Pembangunan mempunyai makna sebagai salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan perencanaan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menimbang kewajiban yang sewajarnya antara lain pemerintah dengan masyarakat desa. Pembangunan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran perbaikan kondisi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pembangunan desa Kepala Desa harus menentukan sasaran yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai sasaran ini, harus didukung juga dengan kemampuan aparatur desa dalam artian aparatur desa harus memiliki kemampuan dan tenaga untuk membuat perubahan dalam desa tersebut dan Kepala Desa juga harus bersifat adil dalam melaksanakan tugas maupun dalam membuat keputusan

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden tentang peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

Dalam bahasa Indonesia “pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun, raja, tua-tua, dan sebagainya. Dalam sebuah pemerintahan desa, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang Kepala Desa.

Seorang Kepala Desa harus mampu menyelenggarakan pemerintahan desa agar bisa membangun desa kearah yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Untuk mengetahui Kepala Desa berhasil atau tidaknya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa bisa dilihat pada tabel yang berikut ini :

Tabel 5.5. Tanggapan responden tentang bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	persentase
1	Sangat baik	16	18,6 %
2	Baik	46	53,5 %
3	Cukup baik	12	13,9 %
4	Kurang baik	6	7 %
5	Sangat tidak baik	6	7 %
	Jumlah	86	100%

Sumber : data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang kepemimpinan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Ranah Baru adalah “baik” hal ini dapat terlihat dari 86 responden 46 orang atau 53,5% menyatakan baik dikarenakan Kepala Desa didalam menyelenggarakan pemerintahan desa sangat bijaksana.

Tabel 5.6.Tanggapan responden tentang bagaimana pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Desa Ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	persentase
1	Sangat baik	15	17,4 %
2	Baik	27	31,4 %
3	Cukup baik	30	35 %
4	Kurang baik	8	9,3 %
5	Sangat tidak baik	6	6,9 %
	Jumlah	86	100%

Sumber : data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa Ranah Baru adalah “cukup baik” hal ini dapat terlihat dari 86 responden 30 orang atau 35% menyatakan cukup baik karena Kepala Desa sudah melakukan pembangunan jalan, jembatan dan tangga pemandian di sungai.

Tabel 5.7.Tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa terhadap masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	18	21 %
2	Baik	45	52,3 %
3	Cukup baik	8	9,3 %
4	Kurang baik	10	11,6 %
5	Sangat tidak baik	5	5,8%
	Jumlah	86	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan,2011

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan aparatur desa terhadap masyarakat adalah “baik” hal ini terlihat dari 86 orang responden, 45 orang atau 52,3% menyatakan baik dikarenakan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan aparatur desa selama mereka berurusan di kantor tersebut.

Tabel 5.8.Tanggapan responden tentang Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	16	18,6 %
2	Baik	30	35 %
3	Cukup baik	20	23,2 %
4	Kurang baik	16	18,6 %
5	Sangat tidak baik	4	4,6 %
	Jumlah	86	100%

Sumber : data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas disimpulkan berdasarkan tanggapan responden tentang Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik adalah “baik” hal ini terlihat dari 86 orang responden 30 orang atau 35 % menyatakan baik dikarenakan masyarakat sudah menganggap kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama dia menjabat walaupun masih seumur jagung.

Tabel 5.9.Tanggapan responden tentang pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mencapai visi,misi dan tujuan pemerintah desa

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	persentase
1	Sangat baik	5	5,8 %
2	Baik	15	17,4 %
3	Cukup baik	5	5,8 %
4	Kurang baik	21	24,4 %
5	Sangat tidak baik	40	46,5 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintahan desa adalah “sangat tidak baik” dikarenakan 40 dari 86 orang responden atau 46,5% mengatakan bahwa aparatur desa belum bertanggungjawab dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah desa.

Tabel 5.10. Rekapitulasi Peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

NO	PERTANYAAN	KATEGORI					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa Ranah Baru?	16 (18,6)	46 (53,5)	12 (13,9)	6 (7)	6 (7)	86 (100%)
2	Bagaimanakah pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Desa Ranah Baru?	15 (17,4)	27 (31,3)	30 (35)	8 (9,3)	6 (6,9)	86 (100%)
3	Bagaimanakah pelayanan yang diberikan aparatur desa terhadap masyarakat?	18 (21)	45 (52,3)	8 (9,3)	10 (11,6)	5 (5,8)	86 (100%)
4	Apakah Kepala Desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik?	16 (18,6)	30 (35)	20 (23,2)	16 (18,6)	4 (4,6)	86 (100%)
5	Bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintahan desa?	5 (5,8)	15 (17,4)	5 (5,8)	21 (24,4)	40 (46,5)	86 (100%)
	JUMLAH	70	163	75	61	61	430
	RATA-RATA	14	32,6	15	12,2	12,2	86
	PERSENTASE	16,3	37,9	17,4	14,2	14,2	100

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2011

Dari hasil Tabel diatas diketahui bahwa 54,2% responden menilai bahwa kepala desa sudah menjalankan peranannya didalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dikarenakan responden atau masyarakat tidak ingin menjelekkkan desanya sendiri, maka dari itu mereka menilai sangat baik dan baik.

Sedangkan 45,8% lagi responden menjawab sesuai dengan kenyataannya atau dengan kata lain menjawab secara objektif karena Kepala Desa belum optimal dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam sebuah proses pembangunan di Desa, seorang Kepala Desa harus mengetahui fungsinya sebagai pemimpin di daerah wilayah pemerintahannya, agar dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal sehingga tidak terjadi hasil pembangunan yang asal jadi. Untuk itu, Kepala Desa hendaknya menyadari betul akan fungsi dan kedudukannya sebagai penggerak atau pelaksana kegiatan-kegiatan pemerintah dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Karena keberhasilan suatu usaha pembangunan sangat dipengaruhi oleh pemahaman seorang pimpinan terhadap tugas dan fungsinya. Fungsi kepemimpinan seorang Kepala Desa salah satunya adalah mengetahui bidang tugasnya, yang mencakup kemampuan Kepala Desa dalam membuat sebuah kebijakan seperti Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur tentang atau untuk setiap perusahaan yang bekerja diwilayah Pemerintahan Desa Ranah Baru baik itu PT, CV dan yang lain sebagainya diwajibkan membayar pajak misalnya 1%, 2%, 3% gunanya adalah untuk pemasukan kas desa. Kepala Desa juga bisa membuat kebijakan mengenai pekerja lapangan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut misalnya diambil dari masyarakat desa setempat.

Pada saat penelitian di desa Ranah Baru, Kepala Desa mengatakan bahwa penyebab terhambatnya pelaksanaan pembangunan di Desa Ranah Baru dikarenakan minimnya pendapatan desa, jadi dengan pernyataan yang penulis ungkapkan diatas bisa dijadikan sebagai contoh dalam mencari bantuan dana atau dana masukan yang lain untuk desa.

Kemudian dalam perencanaan pembangunan, Kepala Desa harus melibatkan RT, RW, badan permusyawaratan desa (BPD), dan kaur atau kasi pembangunan agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik. Untuk pengawasan pekerja dilapangan Kepala Desa juga bisa membentuk tim pengawas dari desa bekerjasama dengan pengawas dari PU kecamatan atau melakukan pengawasan bersama dengan masyarakat.

Dari tabel 5.10 kita dapat melihat peran Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sudah “baik” karena 54,2% responden menjawab baik. Tetapi berdasarkan hasil yang penulis temukan pada saat penelitian masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Membina kehidupan masyarakat desa

Kepala Desa memiliki peran atau tugas untuk membina kehidupan masyarakat desa agar lebih baik lagi dari sebelumnya yaitu dengan memberikan pelatihan ataupun keterampilan bagi masyarakat.

Dengan adanya keterampilan yang dimiliki masyarakat bisa membantu perekonomian masyarakat, karena dengan hasil keterampilan tersebut bisa dijadikan untuk usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11. Tanggapan responden tentang apakah Kepala Desa selalu membina kehidupan masyarakat desa

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	3	3,5 %
2	Baik	6	6,9 %
3	Cukup baik	14	16,3 %
4	Kurang baik	14	16,3 %
5	Sangat tidak baik	49	57 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas, diketahui tentang apakah Kepala Desa selalu membina kehidupan masyarakat desa adalah “sangat tidak baik” karena 49 orang atau 57% dikarenakan Kepala Desa belum ada membina kehidupan masyarakat desa dengan baik.

Tabel 5.12. Tanggapan tentang pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya dalam proses pembangunan fisik di desa Ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	6	6,9 %
2	Baik	36	41,9 %
3	Cukup baik	6	6,9 %
4	Kurang baik	27	31,4 %
5	Sangat tidak baik	11	12,8 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Berdasarkan dari Tabel diatas, diketahui bahwa tanggapan pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya dalam proses pembangunan fisik sudah baik dikarenakan 36 dari 86 responden atau 41,9%

menjawab baik. Hal ini dikarenakan bahwa Kepala Desa selalu mengawasi bawahannya dalam proses pembangunan fisik.

Tabel 5.13. Tanggapan responden tentang perekonomian desa Ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	23	26,7 %
3	Cukup baik	15	17,4 %
4	Kurang baik	42	48,8 %
5	Sangat tidak baik	6	7 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa perekonomian di Desa Ranah Baru adalah kurang baik. Hal ini terlihat dari 42 orang responden dari 86 orang atau 48,8% menjawab kurang baik. Menurut masyarakat perekonomian di Desa Ranah Baru masih jauh dari baik, karena masih banyak masyarakat yang hidup serba kekurangan.

Tabel 5.14. Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	10	11,6 %
2	Baik	31	36 %
3	Cukup baik	27	31,4 %
4	Kurang baik	2	2,3 %
5	Sangat tidak baik	16	18,6 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa masyarakat selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong karena 31 dari 86 orang atau 36% responden menjawab

“baik” karena masyarakat selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang ada di Desa Ranah Baru.

Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dapat terlihat pada rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 5.15. Rekapitulasi Peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa

NO	Pertanyaan	KATEGORI					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Apakah Kepala Desa selalu membina kehidupan masyarakat desa?	3 (3,5)	6 (6,9)	14 (16,3)	14 (16,3)	49 (57)	86 (100%)
2	Apakah pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kinerja bawahannya dalam proses pembangunan fisik di Desa Ranah Baru sudah baik?	6 (6,9)	36 (41,9)	6 (6,9)	27 (31,4)	11 (12,8)	86 (100%)
3	Apakah perekonomian desa Ranah Baru sudah baik?	6 (6,9)	36 (41,9)	6 (6,9)	27 (31,4)	11 (12,8)	86 (100%)
4	Apakah anda selalu ikut serta dalam kegiatan gotong royong di Desa Ranah Baru?	-	23 (26,7)	15 (17,4)	42 (48,8)	6 (7)	86 (100%)
5	Apakah sarana kesehatan di Desa Ranah Baru sudah baik?	10 (11,6)	31 (36)	27 (31,4)	2 (2,3)	6 (18,6)	86 (100%)
	JUMLAH	25	132	68	112	93	430
	RATA-RATA	5	26,4	13,6	22,4	18,6	86
	PERSENTASE	5,8	30,7	15,8	26	21,6	100

Sumber : data olahan lapangan, 2011

Dari tabel 5.15 diatas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa sudah baik hal ini

dapat dilihat dari 36,5% responden sudah mengatakan bahwa Kepala Desa sudah membina kehidupan masyarakat desa dengan memberikan rumah bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Sedangkan 26% responden mengatakan bahwa Kepala Desa masih belum optimal didalam membina kehidupan masyarakat desa, karena masih banyak masyarakat di Desa Ranah Baru yang tergolong kedalam kategori kurang mampu.

Sedangkan 21,6% responden mengatakan bahwa Kepala Desa tidak ada membina kehidupan masyarakat desa, karena Kepala Desa tidak ada membuat program untuk membina kehidupan masyarakat desa, selain itu dalam segi kegiatan gotong royong juga sudah ditiadakan.

Peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan masih kurang baik, karena selain tidak ada program seperti memberikan skill atau pengetahuan keterampilan untuk masyarakat dikarenakan tidak cukupnya dana yang diterima desa Ranah Baru tersebut.

Selain itu sarana kesehatan di desa Ranah Baru Kecamatan kampar Kabupaten Kampar masih belum memadai yang menyebabkan masyarakat harus pergi ke puskesmas atau rumah sakit setempat untuk berobat.

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

Kepala Desa selaku pemimpin di pemerintahan desa mempunyai kewajiban untuk memelihara ataupun menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Karena apabila kepala desa tidak bisa menjalankan tugasnya

untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, maka desa tersebut tidak akan pernah tentram alhasil akan menjadi desa yang kacau balau dan penyelenggaraan pemerintahan desa juga tidak akan bisa berjalan dan akan menghambat pembangunan desa.

Untuk itu, agar bisa mengetahui peran kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sudah berhasil atau belumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.16.Tanggapan responden tentang apakah Desa Ranah Baru sudah termasuk tentram

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	57	66,3 %
3	Cukup baik	16	18,6 %
4	Kurang baik	10	11,6 %
5	Sangat tidak baik	3	3,5 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa desa Ranah Baru sudah termasuk tentram karena 57 dari 86 responden atau 66,3% menjawab baik, hal ini berarti Kepala Desa sudah berhasil membuat desa Ranah Baru termasuk tentram.

Tabel 5.17.Tanggapan responden tentang ketertiban yang ada di Desa Ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	4	4,6 %
2	Baik	44	51,2 %
3	Cukup baik	16	18,6 %
4	Kurang baik	16	18,6 %
5	Sangat tidak baik	6	7 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa desa Ranah Baru sudah termasuk tertib karena 44 dari 86 responden atau 51,2% menjawab “baik” walaupun masih belum terlalu tertib karena 6 orang responden atau 7% menjawab masih kurang baik. Hal ini dikarenakan masyarakat masih kurang dalam menjaga ketertiban yang ada di Desa Ranah Baru.

Tabel 5.18.Tentang ketauladanan yang diberikan Kepala Desa terhadap masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	8	9,3 %
2	Baik	57	66,3 %
3	Cukup baik	9	10,4 %
4	Kurang baik	3	3,5 %
5	Sangat tidak baik	9	10,5 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa sudah mampu memberikan ketauladanan yang baik baik masyarakat, karena 57 atau 66,3% dari 28 responden menjawab baik. Dan selama masa Kepala Desa menjabat dia memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Tabel 5.19.Tanggapan responden tentang program yang dibuat Kepala Desa demi terciptanya ketentraman dan ketertiban

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	9	10,5 %
2	Baik	17	19,7 %
3	Cukup baik	7	8,1 %
4	Kurang baik	9	10,5 %
5	Sangat tidak baik	44	51,2 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Kepala Desa tidak memiliki program demi terciptanya ketentraman dan ketertiban karena 44 atau 51,2% dari 86 responden mengatakan belum adanya program demi terciptanya ketentraman dan

ketertiban di Desa Ranah Baru. Di Desa Ranah Baru tidak ada pos ronda ataupun siskamling.

Tabel 5.20. Tanggapan responden tentang keikutsertaan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa ranah Baru

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	10	11,6 %
2	Baik	60	69,8 %
3	Cukup baik	3	3,5 %
4	Kurang baik	10	11,6 %
5	Sangat tidak baik	3	3,5 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa masyarakat selalu ikut serta didalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desa Ranah Baru karena, 60 atau 69,8% dari 86 responden menjawab baik sedangkan masyarakat yang menjawab tidak ikut serta Cuma 3 orang atau 3,5%.

Tabel 5.21. Rekapitulasi peran Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

No	Pertanyaan	Kategori					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Apakah desa ranah baru sudah termasuk tentram?	-	57 (66,3)	16 (18,6)	10 (11,6)	3 (3,5)	86 (100%)
2	Bagaimanakah ketertiban yang ada di Desa Ranah Baru?	4 (4,6)	44 (51,2)	16 (18,6)	16 (18,6)	6 (7)	86 (100%)
3	Bgaimanakah ketauladanan yang iberikan kepala desa terhadap masyarakat?	8 (9,3)	57 (66,3)	9 (10,4)	3 (3,5)	9 (10,5)	86 (100%)
4	Apakah kepala desa mempunyai program demi terciptanya ketentraman dan ketertiban?	9 (10,5)	17 (19,7)	7 (8,1)	9 (10,5)	44 (51,2)	86 (100%)
5	Apakah masyraka ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa Ranah Baru?	10 (11,6)	60 (69,8)	3 (3,5)	10 (11,6)	3 (3,5)	86 (100%)
	JUMLAH	31	235	51	48	65	430
	RATA-RATA	6,2	47	10,2	9,6	13	86
	PERSENTASE	7,2	54,7	11,8	11,2	15,1	100

Sumber : data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel 5.21 diatas diketahui bahwa peran Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa menurut responden adalah “baik” hal ini terlihat dari 61,9% responden mengatakan bahwa desa Ranah Baru sudah tentram dan tertib dan masyarakat ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Sedangkan hasil dari wawancara penulis dengan penduduk setempat dan berdasarkan penelitian penulis, desa Ranah Baru memang sudah bisa dikatakan cukup baik karena tidak ada keributan yang dibuat masyarakat, walaupun terkadang ada pencurian di rumah warga dan adanya kalangan remaja yang memakai obat-obatan terlarang di Desa Ranah Baru tersebut.

Disini juga ditemukan bahwa Kepala Desa tidak memiliki program demi terciptanya ketentraman dan ketertiban di Desa Ranah Baru, program yang penulis maksudkan disini seperti siskamling atau mengadakan ronda tiap malam, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat setempat agar tidak kemalingan.

Masyarakat juga mengatakan bahwa Kepala Desa belum berhasil dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa ranah Baru dikarenakan sampai saat sekarang ini masyarakat yang memakai obat-obatan terlarang yang sering diresahkan orang tua masih belum bisa diatasi dan mereka masih leluasa dalam mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada anak muda yang lain termasuk anak yang dibawah umur.

d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

Salah satu tugas kepala desa adalah mendamaikan perselisihan masyarakat desa. maksud mendamaikan perselisihan masyarakat desa disini adalah kepala desa harus menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat apabila ada perselisihan anantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan cara memberikan solusi untuk membuat masyarakat bisa kembali berdamai agar jangan sampai kemeja hijau.

Karena kalau kepala desa tidak bisa mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat berarti dia belum bisa menjadi seorang kepala desa dan itu berarti ia (kepala desa) belum berhasil dalam menjalankan fungsinya maupun tugas atau peranannya sebagai pemimpin pemerintahan desa.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya peran kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.22. Tanggapan responden tentang sudah atau belumnya Kepala Desa menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat dengan baik

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	14	16,3 %
2	Baik	46	53,5 %
3	Cukup baik	14	16,3 %
4	Kurang baik	4	4,6 %
5	Sangat tidak baik	8	9,3 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kepala Desa sudah menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat dengan baik karena 46 atau 53,5% responden menjawab “baik”. Menurut masyarakat di Desa Ranah Baru Kepala Desa sudah ada menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat,

walaupun ada beberapa orang masyarakat yang mengatakan bahwa mereka dari dulu sampai sekarang belum bisa berdamai dengan pihak yang bersengketa.

Tabel 5.23. Tanggapan responden tentang tanggapnya Kepala Desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	10	11,6 %
2	Baik	35	40,7 %
3	Cukup baik	28	32,6 %
4	Kurang baik	10	11,6 %
5	Sangat tidak baik	3	3,5 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Kepala desa sudah tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat karena 35 atau 40,7% masyarakat menjawab baik sedangkan yang menjawab kurang baik atau 11,6% dan sangat tidak baik hanya 3 orang atau 3,5% saja.

Tabel 5.24. Tanggapan responden tentang persengketaan yang sudah diselesaikan Kepala Desa dengan baik

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	7	8,1 %
2	Baik	47	54,7 %
3	Cukup baik	26	30,2 %
4	Kurang baik	-	-
5	Sangat tidak baik	6	7 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa 47 atau 54,7% dari 86 responden menjawab “baik”, berarti Kepala desa sudah berhasil menyelesaikan persengketaan yang ada di Desa ranah Baru.

Tabel 5.25. Tanggapan responden tentang kebijakan ataupun keputusan yang dibuat Kepala Desa selama ini

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	8	9,3 %
2	Baik	52	60,5 %
3	Cukup baik	18	21 %
4	Kurang baik	4	4,6 %
5	Sangat tidak baik	4	4,6 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa kebijakan ataupun keputusan yang dibuat Kepala Desa selama ini adalah baik, karena 52 atau 60,5% responden menjawab “baik” karena yang menyatakan Kepala Desa masih kurang dalam baik dalam membuat kebijakan maupun keputusan selama ini hanyalah 4 responden saja atau 4,6%.

Tabel 5.26. Tanggapan responden tentang Kepala Desa bersikap adil dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat

No	Kategori penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	7	8,1 %
2	Baik	59	68,6 %
3	Cukup baik	16	18,6 %
4	Kurang baik	4	4,7 %
5	Sangat tidak baik	-	-
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui bahwa Kepala Desa sudah bersikap adil dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat karena menurut masyarakat, Kepala Desa tidak pernah berat sebelah didalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ini terbukti karena 59 orang atau 68,6% dari 86 responden menjawab baik.

Tabel 5.27. Rekapitulasi peran Kepala Desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa

NO	PERTANYAAN	KATEGORI					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Apakah kepala desa sudah menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat dengan baik?	14 (16,3)	46 (53,5)	14 (16,3)	4 (4,6)	8 (9,3)	86 (100%)
2	Tanggapan kepala desa terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat?	10 (11,6)	35 (40,7)	28 (32,6)	10 (11,6)	3 (3,5)	86 (100%)
3	Apakah sudah ada persengketaan yang sudah diselesaikan kades dengan baik?	7 (8,1)	47 (54,7)	26 (30,2)	-	6 (7)	86 (100%)
4	Bagaimanakah mengenai kebijakan ataupun keputusan yang dibuat kepala desa selama ini?	8 (9,3)	52 (60,5)	18 (21)	4 (4,6)	4 (4,6)	86 (100%)
5	Apakah kepala desa bersikap adil dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat?	7 (8,1)	59 (68,6)	16 (18,6)	4 (4,7)	-	86 (100%)
	JUMLAH	46	239	102	22	21	430
	RATA-RATA	9,2	47,8	20,4	4,4	4,2	86
	PERSENTASE	10,7	55,6	23,7	5,1	4,9	100

Sumber : data olahan lapangan, 2011

Berdasarkan Tabel 5.27 diatas diketahui bahwa peran Kepala Desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa sudah baik karena 55,6% dari 86 responden menganggap Kepala Desa sudah ada menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat seperti : kekerasan dalam rumah tangga yang sampai ketangan pihak berwajib dan masalah perceraian.

Tetapi sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa mereka sampai sekarang belum bisa didamaikan oleh Kepala Desa, sehingga ada dinding

pembatas antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya dan tidak ada tegur sapa sehingga tidak ada silahturrahmi antar pihak yang bertikai.

Kepala Desa didalam menyelesaikan persengketaan yang ada dalam masyarakat selalu bersikap adil dalam mengambil keputusan maupun kebijakan dan tidak ada pandang bulu ataupun memihak yang satu dengan yang lainnya.

Masyarakat sudah merasa sangat puas dengan peran Kepala Desa dalam mendamaikan perselisihan yang ada dalam masyarakat desa Ramah Baru dikarenakan Kepala Desa cepat tanggap dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat kecuali pihak yang bertikai langsung kemeja hijau atau melalui jalur hukum tanpa memberitahunya dulu kepada Kepala Desa.

Jadi hasil terakhir yang penulis temukan adalah Kepala Desa sudah baik dan bijaksana didalam menjalankan perannya dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

1.3 Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses pembaruan yang kontinyu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan itu meliputi segi kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang kesemuanya itu akan berhasil apabila melibatkan partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat itu meliputi kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan dan kegiatan pemeliharaan.

Pembangunan mempunyai makna sebagai salah satu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan perencanaan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan

masyarakat. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka menimbang kewajiban yang sewajarnya antara lain pemerintah dengan masyarakat desa. Pembangunan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran perbaikan kondisi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pembangunan desa Kepala Desa harus menentukan sasaran yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai sasaran ini, harus didukung juga dengan kemampuan aparatur desa dalam artian aparatur desa harus memiliki kemampuan dan tenaga untuk membuat perubahan dalam desa tersebut dan Kepala Desa juga harus bersifat adil dalam melaksanakan tugas maupun dalam membuat keputusan.

a. Memberikan perhatian terhadap pengembangan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.

Kepala desa harus memberikan perhatian terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan kearah yang lebih baik lagi. Yang dimaksudkan disini adalah kepala desa harus mengembangkan kemampuan, keterampilan dan inisiatif guna untuk membuat pembangunan desa yang lebih baik lagi untuk masa depan desa tersebut.

Pembangunan adalah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana asrta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik lagi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dasarnya laju pembangunan di desa adalah kelincahan daya inisiatif dan keterampilan

pemerintah desa dan dilaksanakan dalam rangka keseimbangan kewajiban dan kewajarannya antara lain pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu kepala desa dituntut untuk bisa mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan demi pembangunan desa.

Berikut adalah tabel tentang tanggapan responden terhadap apa yang ingin dilakukan Kepala Desa untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.

Tabel 5.28. Tanggapan responden tentang bagaimana kepala desa dalam mengembangkan kemampuan dan tenaga aparatur desa guna membuat perubahan.

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	5	5,8 %
2	Baik	27	31,4 %
3	Cukup baik	16	18,6 %
4	Kurang baik	27	31,4 %
5	Sangat tidak baik	11	12,8 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa kepala desa dalam mengembangkan kemampuan dan tenaga aparatur desa guna membuat perubahan belum baik hal ini dikarenakan responden yang menjawab baik sebanyak 27 atau 31,4% seimbang dengan responden yang menjawab kurang baik yaitu 27 orang atau 31,4 %.

Tabel 5.29. Tanggapan responden tentang bagaimanakah pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG (teknologi tepat guna) yang ada di desa Ranah Baru

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	8	9,3 %
3	Cukup baik	8	9,3 %
4	Kurang baik	18	20,9 %
5	Sangat tidak baik	52	60,5 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG (teknologi tepat guna) yang ada di desa Ranah Baru sangat tidak baik hal ini terlihat dari 86 responden yang menjawab sangat tidak baik ada 52 orang atau 60,5%.

Tabel 5.30. Tanggapan responden tentang sarana prasarana yang ada dikantor kepala desa

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	4	4,7 %
2	Baik	21	24,4 %
3	Cukup baik	7	8,1 %
4	Kurang baik	52	60,5 %
5	Sangat tidak baik	2	2,3 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan, 2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang sarana prasarana yang ada dikantor kepala desa adalah kurang baik karena 52 responden atau 60,5% dari 86 responden menjawab kurang baik hal ini disebabkan karena responden menilai sarana dan prasarana yang ada dikantor kepala desa masih kurang memadai.

Tabel 5.31Tanggapan responden tentang program yang dibuat kepala desa untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga kerja aparatur desa guna untuk membuat perubahan perekonomian desa kearah yang lebih baik

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	1	1,2 %
2	Baik	29	33,7 %
3	Cukup baik	14	16,3 %
4	Kurang baik	2	2,3 %
5	Sangat tidak baik	40	46,5 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang program yang dibuat kepala desa untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga kerja aparatur desa guna untuk membuat perubahan perekonomian desa kearah yang lebih baik adalah sangat tidak baik karena dari 86 responden yang menjawab sangat tidak baik adalah 40 orang atau 46,5% hal ini dikarenakan kepala desa tidak memiliki proram untuk mengembangkan kemampuan dan tenag kerja aparatur desa guna untuk membua perubahan perekonomian desa kearah yang lebih baik.

Tabel 5. 32Tanggapan responden tentang pembangunan KUD di desa Ranah Baru

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	13	15,1 %
3	Cukup baik	10	11,6 %
4	Kurang baik	17	19,8 %
5	Sangat tidak baik	46	53,5 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa pembangunan KUD di desa Ranah Baru adalah sangat tidak baik karena 46 atau 53,5% dari 28 responden menjawab sangat tidak baik dikarenakan tidak adanya KUD didesa Ranah Baru.

Sedangkan 13 atau 15,1% orang responden yang lainnya lagi menjawab baik dikarenakan mereka kurang mengetahui tentang desa Ranah Baru dan

mereka juga tidak ingin menilai desa mereka jelek sekalipun koperasi unit desa atau yang disingkat dengan KUD ini tidak ada.

Tabel 5.33. Rekapitulasi memberikan perhatian terhadap Pengembangan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.

NO	PERTANYAAN	KATEGORI					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Bagaimana kepala desa dalam mengembangkan kemampuan dan tenaga aparatur desa guna membuat perubahan?	5 (5,8)	27 (31,4)	16 (18,6)	27 (31,4)	11 (12,8)	86 (100%)
2	Bagaimanakah pengembangan wilayah dan pemberdayaan TTG (teknologi tepat guna) yang ada di desa ranah baru?	-	8 (9,3)	8 (9,3)	18 (20,9)	52 (60,5)	86 (100%)
3	Apakah sarana prasarana yang ada dikantor kepala desa sudah memadai?	4 (4,7)	21 (24,4)	7 (8,1)	52 (60,5)	2 (2,3)	86 (100%)
4	Bagaimanakah program yang dibuat kepala desa untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga kerja aparatur desa guna untuk membuat perubahan perekonomian desa kearah yang lebih baik lagi?	1 (1,2)	29 (33,7)	14 (16,3)	2 (2,3)	40 (46,5)	86 (100%)
5	Apakah pembangunan KUD didesa ranah baru sudah terlaksana dengan baik?	-	13 (15,1)	10 (11,6)	17 (19,8)	46 (53,5)	86 (100%)
	JUMLAH	10	98	55	116	151	430
	RATA-RATA	2	19,6	11	23,2	30,2	86
	PERSENTASE	2,3	22,8	12,8	27	35,1	100

Sumber : data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa kepala desa belum memberikan perhatian terhadap “kapasitas” apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan desa kearah yang lebih baik, hal ini terbukti karena 35,1% responden menjawab sangat tidak baik. Hal ini dikarenakan kepala desa tidak ada membuat program untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa maupun masyarakat untuk membuat perubahan desa kearah yang lebih baik.

Selain itu sarana prasarana yang ada dikantor juga belum memadai karena yang ada dikantor Cuma 1 unit komputer, 1 mesin foto copy dan satu unit printer yang menyebabkan lambannya kerja aparatur desa.

Di desa Ranah Baru masih terdapat banyak kekurangan salah satunya adalah tidak adanya koperasi unit desa (KUD) padahal ini sangat penting untuk perekonomian desa. berbeda dengan desa yang lainnya mereka memiliki KUD bahkan bank desa.

Sedangkan 25,1% orang responden lagi menilai bahwa Kepala Desa sudah mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan desa Ranah Baru karena masyarakat selaku responden mengatakan bahwa selama masa jabatannya Kepala Desa sudah membuat desa Ranah Baru menjadi desa yang lebih baik dibandingkan dengan Kepala Desa yang sebelumnya.

b. Keadilan (equity)

Keadilan disini dimaksudkan tentang keadilan yang diberikan kepala desa terhadap aparatur desa dan masyarakat. Kepala Desa dalam pelaksanaan

pembangunan apakah sudah adil didalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan.

Karena seorang kepala desa selaku pemimpin pada pemerintahan desa wajib memberikan keadilan bagi warga atau masyarakatnya dalam segi apapun, karena pemimpin yang baik tidak akan berat sebelah atau pandang bulu dalam membuat keputusan maupun kebijakan.

Untuk mengetahui adil atau tidaknya kepala desa didalam pembangunan desa di desa Ranah Baru dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.34Tanggapan responden mengenai apakah kepala desa sudah memberikan keadilan terhadap masyarakat dengan baik

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	5	5,8 %
2	Baik	43	50 %
3	Cukup baik	29	33,7 %
4	Kurang baik	8	9,3 %
5	Sangat tidak baik	1	1,2 %
	Jumlah	86	100%

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa tanggapan responden tentang kepala desa sudah memberikan keadilan yang baik terhadap masyarakat hal ini dapat terlihat dari jumlah responden yang menjawab baik adalah sebanyak 43 orang atau 50%.

Tabel 5.35Tanggapan responden mengenai apakah kepala desa sudah bersifat adil dalam memberikan jabatan kepada aparatur desa

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	13	15,1 %
2	Baik	48	55,8 %
3	Cukup baik	16	18,6 %
4	Kurang baik	9	10,5 %
5	Sangat tidak baik	-	-
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa kepala desa juga sudah berhasil didalam menjalankan tugasnya karena kepala desa juga adil dalam memberikan jabatan kepada aparatur desa sesuai dengan keahliannya masing-masing. Hal ini terbukti dari 48 responden atau 55,8% menjawab baik.

Tabel 5.36Tanggapan responden mengenai pembangunan yang ada didesa Ranah Baru sudah merata dan adil dalam artian tidak pandang bulu antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	6	7%
2	Baik	11	12,8 %
3	Cukup baik	26	30,2 %
4	Kurang baik	38	44,2 %
5	Sangat tidak baik	5	5,8 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa pembangunan didesa ranah Baru belum merata dan adil karena 38 responden tau 44,2% dari 86 responden menjawab kurang baik hal ini disebabkan mereka merasa kalau pembangunan itu masih belum berjalan secara optimal.

Tabel 5.37Tanggapan responden tentang apakah kepala desa bersifat adil didalam setiap kegiatan-kegiatan rapat mengenai pengambilan keputusan –keputusan didalam rapat.

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	6	7 %
2	Baik	60	69,7 %
3	Cukup baik	14	16,3 %
4	Kurang baik	-	-
5	Sangat tidak baik	6	7 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa kepala desa selalu bersifat adil didalam setiap kegiatan-kegiatan rapat mengenai pengambilan keputusan-keputusan hal ini terlihat dari 86 responden yang menjawab baik sebanyak 60 responden atau 69,7%.

Tabel 5.38Tanggapan responden tentang kepemimpinan kepala desa dalam membuat kebijakan untuk pembangunan desa. apakah sudah adil atau belum

NO	Kategori Penilaian	Jumlah responden	Persentase
1	Sangat baik	8	9,3 %
2	Baik	46	53,5 %
3	Cukup baik	12	13,9 %
4	Kurang baik	8	9,3 %
5	Sangat tidak baik	12	13,9 %
	Jumlah	86	100 %

Sumber: data olahan lapangan,2011

Dari data diatas diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa dalam membuat kebijakan untuk pembangunan desa sudah adil, hal ini terlihat dari tanggapan responden dari 86 orang yang menjawab baik sebanyak 46 orang atau 53,5%.

Tabel. 5.39. Rekapitulasi keadilan (equity)

NO	PERTANYAAN	KATEGORI					JUMLAH
		SB	B	CB	KB	STB	
1	Apakah kepala desa sudah memberikan keadilan terhadap masyarakat dengan baik?	5 (5,8)	43 (50)	29 (33,7)	8 (9,3)	1 (1,2)	86 (100%)
2	Apakah kepala desa sudah bersifat adil dalam memberikan jabatan kepada aparatur desa?	13 (15,1)	48 (55,8)	16 (18,6)	9 (10,5)	-	86 (100%)
3	Apakah pembangunan yang ada didesa Ranah Baru sudah merata dan adil dalam artian tidak pandang bulu antara dusun yang satu dengan dusun yang lainnya?	6 (7)	11 (12,8)	26 (30,2)	38 (44,2)	5 (5,8)	86 (100%)
4	Apakah kepala desa bersifat adil didalam setiap kegiatan-kegiatan rapat mengenai pengambilan keputusan-keputusan dalam rapat tersebut?	6 (7)	60 (69,7)	14 (16,3)	-	6 (7)	86 (100%)
5	Bagaimanakah kepemimpinan kepala desa dalam membuat kebijakan untuk pembangunan desa. apakah sudah adil atau belum?	8 (9,3)	46 (53,5)	12 (13,9)	8 (9,3)	12 (13,9)	86 (100%)
JUMLAH		38	208	97	63	24	430
RATA-RATA		7,6	41,6	19,4	12,6	4,8	86
PERSENTASE		8,8	48,4	22,5	14,7	5,6	100

Sumber : data olahan lapangan,2011

Dari Tabel diatas diketahui bahwa kepala desa sudah sangat adil dalam membuat kebijakan karena 57,2% responden menjawab baik hal ini dikarenakan kepala desa selama masa dia menjabat selalu adil dalam membuat keputusan maupun kebijakan dan tidak pernah pandang bulu ataupun mendahulukan

keluarga daripada masyarakat, karena menurut mereka Kepala Desa yang sekarang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kepala Desa yang sebelumnya.

Sedangkan 20,3% responden lagi menilai Kepala Desa belum adil dalam hal pembangunan dikarenakan jalan ditempat mereka masih belum diperbaiki sedangkan ditempat atau dusun yang lain semua jalan sudah bagus.

Menurut responden selaku masyarakat di Desa Ranah Baru kepala desa adalah orang yang baik dan selalu memberikan keadilan bagi masyarakat. Dan aparatur desa sendiri juga menilai bahwa kepala desa sudah adil dalam menetapkan jabatan untuk pegawai yang ada dikantor tersebut.

Pembangunan yang dibuat seperti jalan sudah merata disetiap dusun alhasil sekarang didesa Ranah Baru sudah tidak ada lagi jalan tanah walaupun kemaren sempat terhenti beberapa waktu tapi sekarang sudah berjalan lagi.

Didalam kegiatan-kegiatan rapat kepala desa juga selalu memberikan kebijakan yang adil dalam membuat keputusan dan tidak berpihak antara yang satu dengan yang lain sehingga masyarakat selalu merasa puas akan sikap kepala desa tersebut.

BAB VI

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah direkapitulasi dari jawaban responden mengenai peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dari hasil penelitian ini diketahui bahwa 54,2% responden menilai bahwa Kepala Desa sudah menjalankan peranannya didalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa sudah baik.
2. Peran Kepala Desa dalam membina khidupan masyarakat desa dari hasil penelitian ini diketahui bahwa tanggapan responden tentang peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa sudah baik, hal ini dapat terlihat dari 36,5% responden mengatakan bahwa Kepala Desa sudah membina kehidupan masyarakat desa dengan memberikan rumah bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu.
3. Peran kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa sudah baik hal ini terlihat dari 61,9% responden mengatakan bahwa desa ranah baru sudah tentram dan tertib.
4. Peran kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat desa sudah baik karena 66,3% dari responden menganggap kepala desa sudah ada menyelesaikan perselisihan diantara masyarakat .

5. Peran kepala desa dalam memberikan perhatian terhadap kapasitas terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan adalah baik , hal ini terlihat bahwa 25,1% responden menjawab baik dikarenakan kepala desa tidak ada membuat program untuk mengembangkan kemampuan aparatur desa maupun masyarakat..
6. Peran kepala desa mencakup keadilan diketahui bahwa kepala desa sudah adil dalam membuat keputusan maupun kebijakan. Hal ini terlihat bahwa 57,2% responden menjawab baik.
7. Secara umum peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Ranah Baru sudah baik.

1.2 Saran

Adapun saran-saran Penulis kepada Kepala Desa di Desa Ranah Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tertsebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkannya lagi peran Kepala Desa terutama dalam bidang pembangunan desa.
2. Kepala Desa harusnya melibatkan BPD dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Kepala Desa Ranah Baru hendaknya melakukan gotong royong minimal 2 minggu sekali, memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat dan memberikan perlengkapan yang dibutuhkan aparatur desa agar bisa menjalankan tugasnya lebih baik lagi.

4. Kepala Desa seharusnya membuat poskamling agar desa Ranah Baru lebih aman lagi dan terhindar dari kejahatan, karena masyarakat sering resah akibat sering terjadinya kemalingan.
5. Kepala Desa selaku pemimpin sebaiknya mengadakan musyawarah atau rapat dan perlu ditanamkan partisipasi disamping itu juga Kepala Desa harus menjadi panutan, sehingga dapat menjadi suri tauladan dalam memimpin dan melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji.2003. *Psikologi kepemimpinan*, Semarang: Rineka Cipta.
- _____ dkk. *Pengantar bisnis modern*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bungin, Burhan.2006.*Metodologi penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Hamim, Sufian.2003. Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan, Pekanbaru: UIR Press.
- Handoko, T. Hani.2003. *Pengantar Manajemen*, Jakarta.
- Kartono, Kartini.2002. *Pemimpin & Kepemimpinan (Edisi Baru)*,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moekijat. 2000. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution Zulkarimen.2002.*Komunikasi Pembangunan*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ndraha Talizi Duhu.2003.*Kybernology (ilmu pemerintahan baru)*, Rhineka Cipta.
- Nugroho dan Dahuri.2004.*Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi,Sosial dan Lingkungan*,LP3S.
- _____ .2003.*Reinventing Pembangunan*,Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurman.2003.*Siasat Jurnal Ilmu Spesial Volume 12*,Pekanbaru:UIR Press.
- Sugiyono.2007. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Rivai Veithzal. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Kedua*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian Sandang ,2000. *Administrasi Pembangunan*,Jakarta: Gunung Agung.
- Terry George.2000. *Prinsip-prinsip Manajemen*.Alih Bahasa J.Smith D.F.M, Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah.2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Haw.2003. *Otonomi Desa*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaja Haw.2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkifli.2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press.